

BAB I

PENDAHULUAN

Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dikarenakan hutan di wilayah Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami tingkat deforestasi yang meningkat, Indonesia mendapati peringkat ke tiga dunia setelah Brazil dan Zaire. Secara tidak langsung deforestasi memberikan dampak yang buruk bagi kesejahteraan alam Indonesia, hilangnya hutan tentu saja merusak beberapa ekosistem yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai kontribusi antara Diplomasi publik dan Greenpeace dalam penanganan kasus deforestasi yang berada di Indonesia.

A. Latar Belakang Masalah

Studi Hubungan Internasional memiliki cakupan yang sangat luas, di awal terbentuknya studi Hubungan Internasional, Ilmu ini hanya terfokus pada masalah politik dan keamanan. Pada saat ini studi Hubungan Internasional menjadi lebih beragam, dengan telah terjadinya fenomena globalisasi saat ini. Diplomasi sebagai salah satu kajian keilmuan dari Hubungan Internasional digunakan sebagai salah satu inisiatif mempromosikan negara, meningkatkan eksistensi, atau menyebarkan pengaruhnya ke negara lain, untuk meraih kepentingan nasionalnya masing-masing (Nurika, 2017). Dalam hubungan internasional yang merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara dalam menentukan eksistensi didalam pergaulan Hubungan Internasional. Hubungan kerjasama suatu negara dengan pihak lain diluar negeri merupakan sebuah kebutuhan yang tak dapat dilewatkan di era globalisasi (Ardhan, 2019).

Topik lingkungan hidup muncul semakin sering dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat dan aktivitas ekonomi manusia yang selalu meningkat sehingga dapat mengancam aktivitas lingkungan hidup. Isu lingkungan sebagai lingkup kajian baru dalam studi Hubungan Internasional, mencoba untuk menjelaskan serta menganalisa perilaku organisasi internasional dengan fokus terhadap konservasi lingkungan yang aman (Sayyidati, 2017). Salah satu isu lingkungan yang mendapat perhatian khusus terutama di Indonesia yakni permasalahan deforestasi hutan. Deforestasi merupakan kegiatan penggundulan hutan atau pengalihan hutan dengan tujuan lain seperti pertanian, peternakan, atau perkotaan. Menurut *Guinness Book of Record*, Indonesia tercatat sebagai negara dengan laju kerusakan hutan tercepat di dunia dengan 2% lahan hutan berkurang setiap tahunnya. Berdasarkan hasil Analisa FWI (*Forest Watch Indonesia*), laju deforestasi di Indonesia dalam tiga periode mengalami penurunan yakni dua juta ha. pertahun dalam kurun waktu 1980 - 1990-an, sekitar 1,5 juta

pertahun selama 2000-2009 dan sekitar 1,1 juta ha. pada periode 2009-2013. Akan tetapi, penurunan tersebut dikarenakan kawasan hutan yang semakin berkurang (Suryatmojo, 2021).

Diplomasi berasal dari kata Yunani “*diploun*” yang berarti “melipat”. Menurut *the Chamber's Twentieth Century Dictionary*, diplomasi berarti “*the art of negotiation, especially o treaties between states; political skills*” atau seni berunding, terkhusus membahas tentang perjanjian di antara negara-negara; keahlian politik). Ivo D. Duchachek berpendapat bahwasanya, “Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi antar negara lain”. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain. Diplomasi juga tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tetapi juga menyangkut kegiatan multi-dimensional yang digunakan dalam situasi dan lingkungan apa pun dalam hubungan antar bangsa. Diplomasi publik yang dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui proses *understanding, informing, and influencing foreign audiences* (Mehrunisa, 2017) dan dapat dikolaborasikan dengan suatu organisasi kampanye independen yang menggunakan aksi konfrontatif, kreatif, dan tanpa kekerasan dalam mengungkap isu-isu lingkungan global yakni Greenpeace yang memang mempunyai tujuan yang mulia yakni menjaga agar bumi yang semakin rapuh ini tetap menompang kehidupan seluruh makhluk hidup (Greenpeace, 2019).

Melihat kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia tiap tahunnya yang memakan 684.000 ha. per-tahun akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, penambahan hutan, dan alih fungsi lahan yang memang diakibatkan atas kerakusan perusahaan yang semena-mena mengambil alih fungsi paru-paru dunia. Menurut data yang dirilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) berdasarkan data dari *Global Forest Resources Assessment (FRA)*, Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brazil yang berada di urutan pertama (Assifa, 2016). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha. atau 50,1% dari total daratan. Data Ditjen PKTL juga menunjukkan tren deforestasi Indonesia relatif lebih rendah, dan cenderung stabil. Deforestasi netto tahun 2018-2019, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462.000 ha. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465.500 ha. dengan dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3.100 ha. (PPID, 2020). Sesuai perkembangan teknologi, perhitungan luas deforestasi sejak periode tahun 2011-2012 merupakan hasil perhitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan kegiatan reforestasi. Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan deforestasi bruto. Kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari

waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, dan kebakaran hutan.

Saat ini kita sedang berada di situasi yang krusial dikarenakan kasus-kasus deforestasi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin mengalami kenaikan yang drastis. Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari pengkomunikasian kebijakan luar negeri terhadap publik manca. Ciri utama dalam diplomasi publik adalah melibatkan semua *stakeholder* dalam prosesnya. *Stakeholder* disini tidak hanya Departemen Luar Negeri, tetapi juga lintas Departemen dalam pemerintah, swasta, NGO, media, dan individu. Dengan porsi keterlibatan yang beragam dan besar tersebut, maka rancangan strategi komunikasi harus dikedepankan. Diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan politik luar negeri. Di era informasi, pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah. Karakteristik dunia seperti ini membutuhkan manajemen informasi untuk menyatukan masalah domestik dan luar negeri (Saefudin, 2008). Melihat diplomasi sebagai konsep yang sifatnya multi dimensi dan mencakup tiga tujuan utama, yaitu : (1) mempromosikan tujuan dan kebijakan negara, (2) bentuk komunikasi nilai dan sikap, serta (3) sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman bersama dan *multural trust* antara negara dan masyarakat. Mengacu pada tujuan tersebut, diplomasi publik menekankan pesan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagai bentuk partisipasi, perlu dibangun strategi komunikasi dalam diplomasi publik, yaitu strategi komunikasi pemerintah untuk mengatur kekuatan-kekuatan di dalam seperti misalnya menggunakan kelompok non-negara (MNC, NGO) dan strategi komunikasi di luar dengan kelompok sasaran publik manca. Diplomasi publik berbicara mengenai membangun hubungan bukan pada proyek identitas. Diplomasi publik bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri, dan bukan semata-mata praktek teknik *marketing*, *advertising*, manajemen media atau *spin doctor*, melainkan sebuah bentuk luas dari perubahan diplomasi (Saefudin H. , 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang sudah di uraikan diatas, melihat dari sisi deforestasi yang terjadi dan terus meningkat tiap tahunnya di Indonesia, penulis tertarik untuk menganalisis terkait kebijakan Diplomasi Publik terhadap deforestasi yang terjadi di Indonesia. Maka dapat dirumuskan: “Bagaimana strategi Diplomasi Publik yang dilakukan oleh Greenpeace untuk mengurangi kasus deforestasi yang meningkat di Indonesia ?”

C. Kerangka Teoritik

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil Teori *Green Diplomacy* dan Diplomasi Publik dikarenakan teori tersebut mempunyai korelasi yang kompleks terhadap pemikiran

ekologis dan adanya peran Greenpeace yang dicantumkan penulis dalam tulisan ini. Perhatian Hubungan Internasional kepada terhadap negara, dalam sistem Internasional merupakan tantangan untuk memikirkan masalah lingkungan.

1. Green Diplomacy

Pada bulan Juni 2003, Thessaloniki *European Council* meyetujui untuk meluncurkan inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi lingkungan ke dalam hubungan eksternal melalui penciptaan jaringan informal, yang dikenal sebagai jaringan Diplomasi Hijau (*Green Diplomacy Network*)(Mukti, 2017). Masuknya pendekatan terhadap isu lingkungan ke dalam Hubungan Internasional sudah memiliki pengaruh yang signifikan teoritis dan implikasi kebijakan praktisnya dapat dipandang kompatibel atau tidak dapat didamaikan dengan asumsi-asumsi tradisional dan praktiknya dewasa ini. Jika dilihat secara alternatif maka dapat mengarah pada transformasi teoritis dan praktis dikarenakan teori dan praktik saling mempunyai korelasi. Perubahan lingkungan belum mengubah teori Hubungan Internasional yang mana hubungan negara yang kompetitif tidak kondusif untuk Kerjasama lingkungan atau mendorong pemikiran hijau. (Hafhiz, 2016). Terdapat dua pendekatan utama dalam wacana mengenai lingkungan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang meletakkan manusia sebagai pusat dari pembicaraan mengenai isu lingkungan atau antroposentris dan lebih dikenal dengan sebutan *thinking green*. Dalam pendekatan ini, manusia merupakan makhluk yang memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan sebagai tempat tinggalnya (Anindya, 2014). Pandangan semacam ini kemudian meletakkan lingkungan hanya sebagai obyek semata dan mereka para kaum penganut pendekatan ini percaya bahwa solusi terhadap persoalan lingkungan dapat diselesaikan melalui peningkatan pengetahuan manusia dalam bidang teknologi. Karakteristik *Green Diplomacy* yakni ekosentrisme, yaitu sebuah penolakan terhadap pandangan dunia antroposentrisme yang hanya menempatkan nilai moral atas manusia menuju sebuah pandangan yang juga menempatkan nilai independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup. Ekosentrisme melibatkan sejumlah klaim empiris tentang suatu pandangan dunia yang secara ontologis terdiri dari relasi bukan entitas individu. Semua makhluk hidup pada dasarnya terikat hubungan dengan ekologi (Prabowo, 2020).

2. Diplomasi Publik

Diplomasi publik dimaknai dengan sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, kebijakan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya (Raul, 2020). Walter Lippman dalam bukunya yang berjudul "*Public Opinion*"

mengatakan bahwa citra dapat dinyatakan secara singkat sebagai gambaran dalam benak masing-masing. Diplomasi publik bertujuan untuk menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui jalur media sosial yang mana peranan media sosial pada saat ini mempunyai pengaruh yang besar bagi kita semua dalam pencarian informasi dan juga membentuk persepsi positif dikalangan publik melalui penyebaran informasi, perluasan informasi dan bentuk-bentuk kegiatan yang langsung menyentuh kegiatan aktor-aktor non pemerintah. Oleh karena itu diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antara budaya terkait berubahnya sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan kebijakan luar negeri. Diplomasi publik dipercayai sebagai instrument yang paling efektif untuk melibatkan negara yang mempunyai permasalahan (Ashana, 2017). Dalam sejarah diplomasi, bentuk diplomasi publik umumnya berupa kontak satu pemerintah terhadap publik dari negara lain. Diplomasi publik umumnya tidak diharapkan untuk menarik perhatian publik dalam jangka waktu yang pendek, namun mekanisme diplomasi ini bertujuan untuk menumbuhkan minta individu yang memiliki pengaruh pada lingkup masyarakat yang lebih luas. Selain berfungsi sebagai media sosialisasi, diplomasi publik juga bertujuan untuk menimbulkan informasi dua arah yaitu untuk mengetahui respon dari publik negara asing agar dapat melakukan pendekatan yang lebih baik bahkan melakukan revisi pada kebijakan luar negeri. Urgensi manajemen diplomasi publik mengalami pergeseran seiring dengan perubahan dalam faktor yang menentukan kekuatan dalam Hubungan Internasional. Dalam Hubungan Internasional, pendekatan dalam mencapai kepentingan nasional dilakukan dengan *hard power* dan *soft power*, yang lebih mengedepankan pendekatan kultural. Diplomasi publik menjadi salah satu representasi sebagai usaha resmi dari pemerintah suatu negara untuk membentuk komunikasi di luar negeri, dimana kebijakan luar negerinya dijalankan dengan tujuan mengurangi kesalahpahaman dan mispersepsi yang dapat menyulitkan hubungan negaranya dengan negara lain (Ayunda, 2020).

Penerapan teori yang pertama adalah pada pendekatan Greenpeace untuk mengupayakan tujuan mereka terhadap jaringan informal yang mana *green diplomacy* itu merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan lingkungan. Lalu pada teori diplomasi publik, digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh greenpeace untuk membentuk persepsi positif terkait lingkungan kepada masyarakat luas.

D. Hipotesa

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan kerangka teoritik, maka penulis dapat mengambil hipotesa penelitian yaitu Strategi Diplomasi Publik yang dilakukan oleh Greenpeace untuk mengurangi kasus deforestasi yang meningkat di Indonesia dengan cara :

1. Melakukan *Corporate Campaign* tentang kampanye lingkungan
2. Menyebarkan informasi lewat media sosial dan penyadaran secara langsung kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian alam.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini bersifat studi pustaka (*library research*) yang mana dalam penelitian ini menggunakan buku, jurnal, dan literatur lainnya sebagai objek utama. Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian peneliti analisa metode deskriptif. Dengan penelitian kualitatif, yang mana perlu dilakukan sebuah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan dengan jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis. Metode kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang akan di ambil dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian ini dimulai pada tahun 2016 - 2021, sebenarnya Indonesia telah mempublikasikan hasil penghitungan angka deforestasi sejak tahun 2006 dan secara periodik telah menerbitkannya setiap tahun.

G. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi peran diplomasi publik dan Greenpeace untuk mengurangi kasus deforestasi yang terjadi di Indonesia. Beberapa kegiatan yang diindikasikan sebagai penyebab deforestasi antara lain, pengelolaan hutan secara intensif pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK); konversi kawasan hutan untuk penggunaan oleh sektor lain, seperti perluasan pertanian, pertambangan, perkebunan dan transmigrasi, pengelolaan hutan yang tidak lestari; pencurian kayu atau penebangan liar; perambahan dan okupasi lahan pada kawasan hutan serta kebakaran hutan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis akan menjelaskan faktor-faktor penyebab adanya deforestasi dari tahun 2016 -2021.

Bab III, penulis menjelaskan mengenai strategi diplomasi public Greenpeace Indonesia untuk mengurangi deforestasi melalui *corporate campaign* tentang kampanye lingkungan.

Bab IV, berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.